
Strategi Perempuan dalam Jejaring Politik Melalui Area Ekonomi

Purnami Safitri*¹, Radiyatun Adabiyah*²

¹Prodi Pemikiran Politik Islam, ²Prodi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram

Abstrak:

Penelitian ini berjudul: “Strategi Perempuan dalam Jejaring Politik melalui Area Ekonomi”. Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran perempuan anggota IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Region NTB mengenai partisipasi aktif dalam politik telah terbangun dengan baik. Kesadaran ini tidak saja dikondisikan atau ditransfer oleh IWAPI terhadap anggotanya, namun anggota IWAPI yang secara individu telah memiliki pandangan terhadap pentingnya peran atau partisipasi aktif perempuan dalam politik. 2) Pemetaan politik pada dasarnya sangat bergantung dari kapasitas personal atau individu, baik dari konteks kepemilikan sumber daya dan tingkat pengalaman. Secara formal, IWAPI menegaskan organisasi ini sebagai wadah sosial, non-profit yang memiliki misi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Oleh karena itu jika pemetaan politik dimaknakan secara organisasional formal melalui IWAPI, maka hal tersebut tidak terjadi. 3) Secara sederhana, IWAPI dapat dikategorikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh kelompok strategis untuk menjamin akses terhadap sumber daya tertentu, yang dapat dikatakan sebagai kelompok strategis disini adalah perempuan. Sebagai kelompok strategis, perempuan melalui IWAPI berupaya membangun aliansi dan jejaring sumber daya. Ada dua mode apropriasi yang dijalankan, yakni mode apropriasi personal dan korporat. 4) Strategi yang dijalankan *vis a vis* dengan kelompok strategis lainnya, misalnya HIPMI dan berupa kerjasama (*cooperation*). Ini terlihat dari relasi institusional yang sifatnya informal IWAPI dan HIPMI.

Kata Kunci : Strategi Perempuan, IWAPI, Jejaring Politik, Area Ekonomi

Abstract:

This research is entitled: "Women's Strategy in Political Networks through the Economic Area". The research is a type of field research that is descriptive qualitative in nature. Data collection was carried out through a process of observation, interviews and documentation. The research results show that: 1) The awareness of women members of the IWAPI (Indonesian Women Entrepreneurs Association) NTB Region regarding active participation in politics has been well developed. This awareness is not only conditioned or transferred by IWAPI to its members, but IWAPI members who individually have views on the importance of the role or active participation of women in politics. 2) Political mapping basically depends very much on personal or individual capacity, both from the context of resource ownership and level of experience. Formally, IWAPI emphasizes that this organization is a social, non-profit forum that has a mission to develop and empower women's economies. Therefore, if political mapping is interpreted in a formal organizational way through IWAPI, then this does

not happen. 3) In simple terms, IWAPI can be categorized as an organization formed by a strategic group to guarantee access to certain resources, which can be said to be a strategic group here are women. As a strategic group, women through IWAPI seek to build alliances and resource networks. There are two modes of appropriation that are carried out, namely personal and corporate appropriation modes. 4) The strategy implemented vis a vis other strategic groups, for example HIPMI and in the form of cooperation. This can be seen from the informal institutional relations between IWAPI and HIPMI.

Keywords: Women's Strategy, IWAPI, Political Networks, Economic Areas

Pendahuluan

Dalam kultur patriarkal, perempuan dan politik adalah antitesa; suatu manifestasi kontradiksi laten, dan mengingkari kodrat penciptaan. Dalam konteks budaya patriarki, laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan ditempatkan dalam posisi dominan sehingga patriarki disebut pula sebagai budaya *rule of the father*, atau aturan laki-laki. Konsep ‘aturan laki-laki’ ini kemudian membawa pada konsekuensi tegaknya sistem sosial dan budaya yang berdasarkan pada norma kekuasaan laki-laki, dimana corak hubungan sosial ditandai dengan penerimaan laki-laki sebagai penguasa. Dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap memiliki hak alami terhadap kekuasaan sehingga secara alamiah pula, laki-laki dianggap superior atau dominan dalam semua aspek dan relasi sosial. Dengan demikian, laki-laki diterima sebagai pihak yang memiliki kontrol, sebagai *decision maker*, serta menjadi pusat kegiatan sosial dan privat dimana laki-laki menjadi fokus dan agen perkembangan dan invensi sosial (*male centeredness*).

Dalam konteks politik, budaya patriarki membawa konsekuensi yang serius bagi pengakuan hak-hak politik perempuan. Politik yang terbangun dari budaya patriarki menciptakan politik yang bias laki-laki dan berorientasi pada laki-laki (*male-stream*). Rhodiyah (2013:60) menyebutkan bahwa konsekuensi budaya patriarkal dalam kehidupan politik adalah pengakuan masyarakat yang bertumpu kepada laki-laki sebagai akar dalam politik. Logika yang menumpukan laki-laki sebagai akar dalam politik dengan demikian tidak mengakui perempuan dan kapasitas agensinya dalam politik. Perempuan dalam politik dianggap bersifat *complementary*, dan dipandang sebagai aktor yang pasif dan fatalis. Bahkan, meski perempuan saat ini telah terlibat dalam politik, namun keterlibatan tersebut kerap kali bukanlah berasal dari *genuine will* dari perempuan, namun lahir dari situasi pengkondisian dan dorongan eksternal. Dorongan eksternal ini bias berasal dari pihak laki-laki; bukan karena pengakuan terhadap kesetaraan perempuan namun diakibatkan oleh, misalnya dorongan kebijakan afirmasi politik perempuan, yang mensyaratkan kuota 30 persen perempuan dalam legislatif. Hal ini senada dengan apa yang diungkap oleh Rhodiyah (*Ibid.*) penerimaan laki-laki sebagai kepala keluarga menyebabkan aspirasi politik perempuan kerap kali diwakilkan oleh laki-laki, baik itu Ayah, Saudara laki-laki, suami, paman dan lain sebagainya; jikapun mereka berpartisipasi aktif dan menduduki jabatan publik atau partai politik, hal tersebut justru tidak dilihat sebagai prestasi perempuan sebagai individu politik namun

keikutsertaannya dalam politik itu dilihat sebagai bagian dari kekuasaan atau jabatan suami atau laki-laki (lih. Winarto, 2002:113).

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia adalah suatu organisasi perempuan yang menaungi para pengusaha perempuan. Tujuan dasar pembentukan organisasi ini membantu para pengusaha perempuan untuk mengembangkan kapasitas, potensi, dan juga membuka kesempatan terhadap akses finansial yang memadai. Dalam perspektif gender, perempuan kerap menghadapi keterbatasan karena peran gendernya. Dalam masyarakat yang patriarkis, peran ekonomi perempuan dalam keluarga dipandang sebagai hal yang minor, sebagai tambahan (*additional*) semata. Dalam konsep patriarki, laki-laki bertanggung jawab secara penuh dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga atau pemberi nafkah, dan perempuan berada dalam posisi kelompok penerima nafkah.

Pelabelan perempuan dan perannya dalam peradaban dan budaya yang kontradiktif ini merupakan sumber legitimasi struktur kekuasaan yang juga menciptakan ritus-ritus kekuasaan terhadap perempuan, baik tubuhnya maupun kerja dari tubuh itu (aktivitas) (baca: pendisiplinan tubuh). Ritus-ritus dominasi itu dilakukan melalui stigma, labelisasi (stereotype), serta kekuasaan simbolis yang membangun imaji perempuan sebagai kelompok lemah yang patut dilindungi serta diatur dan dibatasi. Namun anehnya, keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang mesti dilindungi melahirkan ironi. Alih-alih mendapat perlindungan, perempuan menjadi kelompok marjinal yang rentan mengalami objektifikasi dan kekerasan, baik fisik, ekonomi dan sosial, mental dan seksual. Dengan kata lain, perlindungan adalah permainan bahasa kekuasaan simbolis yang manipulatif; dia adalah penanda yang dianggap petanda yang beroperasi dalam simulacra yang membentuk hiperealitas (lihat Baudrillard, 1970; Baudrillard: 1981 dalam Haryatmoko, 2016: 63-86). Pada akhirnya, struktur patriarkal menciptakan lingkaran setan subordinasi perempuan; stigma dan pelabelan perempuan menyebabkan marjinalisasi yang merenggut hak-hak perempuan. Marjinalisasi menciptakan struktur ketidakberdayaan yang akhirnya memperkuat stigma. Ini adalah siklus kekuasaan; siklus kekerasan terhadap perempuan.

Siklus kekerasan terhadap perempuan ini berlangsung dan berlanjut secara terus menerus yang disebabkan setidaknya oleh beberapa hal, *pertama* inferioritas ekonomi perempuan dimana perempuan terkekslusi dari arena ekonomi. Pandangan ini merupakan inti argumen feminisme liberal. *Kedua* persoalan struktur kapitalisme yang eksploitatif terhadap perempuan dan ketiga karena struktur ideologi, konstruksi budaya, dan sistem gender/sex dalam masyarakat yang membagi peran antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan ranah lingkup kerja perempuan dan laki-laki, yang pembilahan ini mengikuti alur logika kekuasaan yang hirarkis.

Inferioritas perempuan dalam ekonomi oleh feminis liberal dipandang sebagai sebab utama ketertindasan perempuan. Dalam aspek ini, ketidakberdayaan ekonomi kerap membuat perempuan berada dalam posisi bergantung terhadap laki-laki maupun suaminya. Keterjebakan perempuan ini menyebabkan perempuan tidak menyadari akan potensi dan

kapabilitasnya sebagai individu serta tidak menyadari hak kesetaraannya. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi merupakan hal yang krusial.

Pentingnya perempuan dalam ekonomi tidak saja didukung oleh argument kesetaraan gender namun juga fungsionalitas atau kontribusi ekonomi perempuan dalam pembangunan suatu Negara. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ekonomi perempuan berkontribusi terhadap laju pembangunan suatu Negara, bahkan Sarah Iqbal dari Bank Dunia dengan tegas menyebut “*No women, no growth,*” yang kemudian diperjelas oleh Kristaline Georgieva, *Chief Executive Officer* dari Bank Dunia, yang mengatakan bahwa “*no economy can grow to its full potential unless women and men participate fully.*” PBB menyebutkan bahwa, pemberdayaan ekonomi perempuan adalah kunci dalam mewujudkan kesetaraan perempuan dan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan didalamnya juga termasuk upaya penguatan kapasitas perempuan dalam berpartisipasi secara setara dalam pasar, upaya peningkatan akses dan kontrol mereka terhadap asset-aset produktif sehingga pada saat yang sama akan meningkatkan kesadaran akan otonomi mereka sebagai individu dan mendorong aktivisme agensi mereka untuk berpartisipasi dalam sektor lainnya.

Sayangnya, meski kesadaran akan peran penting perempuan dalam ekonomi telah meluas, namun pada kenyataannya perempuan masih menghadapi batasan kultural, sosiologis dan bahkan hukum yang menghalangi perempuan untuk terlibat secara penuh dalam sektor ekonomi. Dalam *World Bank Group's Women, Business and Law Report* (2018), sebuah laporan yang dirilis oleh Bank Dunia mengenai hukum dan bisnis perempuan, disebutkan bahwa setidaknya ada 104 negara memiliki produk hukum yang mendiskriminasi perempuan dalam sektor kerja tertentu (World Bank Group's Women, Business and Law, 2018).

Inklusi perempuan dalam pembangunan dan ekonomi pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1960-an yang kemudian melahirkan berbagai pendekatan perempuan dalam pembangunan, diantaranya *women and development* (WAD), *Women in Development* (WID) dan *Gender and Development* (GAD). Pada konteks multilateral, PBB pada tahun 2015 merumuskan sebuah resolusi bersama Negara-negara anggota PBB mengenai agenda pembangunan dunia *sustainable development goals* atau SDGs. Dengan *tagline* “*no-one left behind,*” SDGs bertujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sebagai pondasi dasar perdamaian dan kemakmuran dunia. SDGs sendiri merupakan kelanjutan resolusi yang telah ditetapkan PBB sebelumnya, yakni *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditandatangani sebagai Deklarasi Millenium pada tahun 2000.

SDGs sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang menggambarkan sasaran dan lingkup agenda pembangunan global. Kesetaraan Gender merupakan tujuan ke 5 dalam SDGs yang masuk dalam kategori pembangunan sosial. Dalam tujuan ke 5 SDGs, agendanya tidak saja membangun kebijakan politik dan hukum yang responsive gender namun juga memastikan kesetaraan hak akses terhadap pendidikan, kesehatan, politik maupun sumber daya ekonomi. Oleh karenanya, Negara dituntut untuk memberikan ruang baik itu dalam bentuk regulasi yang bersifat afirmatif maupun kebijakan yang berorientasi pada pengarusutamaan gender

untuk terus mengupayakan kesetaraan hak ekonomi yang berbasis pemberdayaan. Meskipun skor Gender Inequality Index (GII) Indonesia masih rendah, yakni masih diangka 0,436, namun angka ini lebih baik dibanding dengan skor GII pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai skor 0,7 pada tahun 2008. Artinya upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan setara terus diupayakan.

Selain mengeluarkan kebijakan dan produk hukum yang mengamanatkan kesetaraan gender (misalnya Pengarusutamaan Gender dalam Inpress No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender), Negara terus berupaya mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan baik itu melalui skema bantuan pembiayaan keuangan usaha perempuan, ataupun melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi perempuan. Selain itu, Negara juga mendorong aktor non-negara atau masyarakat sipil untuk ikut terlibat dalam berbagai kampanye kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Negara atau pemerintah juga memberi ruang bagi komunitas dan asosiasi ekonomi perempuan untuk terus melakukan advokasi dan program pemberdayaan ekonomi perempuan bersama dengan pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat maupun asosiasi dapat menjadi mitra pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesetaraan gender, terutama pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

IWAPI sendiri adalah wadah pengusaha perempuan yang beranggotakan kurang lebih 4 ribu pengusaha perempuan, baik itu pengusaha kecil (85%), pengusaha menengah (12%) dan pengusaha besar (3%). Dengan memiliki cabang hingga 256 cabang yang tersebar di 30 provinsi, IWAPI menjadi organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. IWAPI bahkan ditunjuk sebagai *Chair Country* dari ASEAN Women Entrepreneurs' Network (AWEN). IWAPI sendiri menempatkan dirinya sebagai mitra pemerintah untuk mencapai dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan sembari menjadi wadah aspirasi dan kepentingan kelompok pengusaha wanita.

Sepak terjang dan peran IWAPI memberikan suatu gambaran atau representasi peran perempuan, tidak saja dalam penguatan ekonomi perempuan namun juga dalam ruang publik secara umum. Melihat jumlah keanggotaan IWAPI yang tidak kecil, setidaknya dapat dilihat secara sekilas kontribusi ekonomi perempuan yang terbilang tidak kecil. Apalagi jika dilihat dari keanggotaannya, IWAPI semestinya dilihat bukan hanya sekedar organisasi perempuan pengusaha, namun ia adalah bagian dari jejaring *big business* atau kelompok bisnis perempuan. Meski dalam konteks keanggotaan, IWAPI didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah namun *leader* atau *think-tank* organisasi ini adalah perempuan pengusaha skala menengah keatas. Dalam hal ini, penulis hendak menekankan potensi strategis kelompok pengusaha wanita ini melebihi potensi advokasi mereka terhadap pengembangan usaha UMKM perempuan.

Penelitian ini hendak melihat bagaimana perempuan yang tergabung dalam IWAPI menggunakan modal institusional mereka sebagai anggota IWAPI untuk membangun relasi dan jejaring politik, yang tentunya tujuan utama mereka adalah mencapai kepentingan politik;

yakni apropriasi kepentingan melalui perubahan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendobrak pandangan yang dikotomis antara ranah ekonomi dan politik, dimana ekonomi kerap disebut sebagai arena dan isu *low politics*. Selama ini, pengorganisasian diri perempuan dalam sektor ekonomi, sosial maupun sektor non-politik lainnya kerap dipandang sebagai persoalan atau aktivisme non-strategis. Persoalan yang non-strategis ini secara sederhana diartikan sebagai aktifitas yang terkekslusi atau berjarak dan tidak berdampak terhadap *decision making process*.

Dalam perspektif ini, perempuan dipandang sebagai suatu kelompok strategis yang memiliki tujuan apropriasi tertentu dengan tujuan melanggengkan atau mengubah skema suatu apropriasi sumber daya, maka perempuan sebagai kelompok strategis akan dilihat sebagai kelompok individu aktif yang memiliki strategi dan visi ataupun misi tertentu yang tidak saja berkaitan dengan upaya pemeliharaan atau memperbesar akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, namun juga berkaitan dengan pengaruh politik dan akses terhadap proses pembuatan kebijakan dan perubahan yang bersifat institusional. Strategi yang digunakan dapat bervariasi, misalnya membangun jejaring politik dari berbagai arena, baik itu budaya, sosial maupun agama..

Kerangka Teoritik

Pada penelitian ini terdapat teori-teori sebagai landasan atau acuan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Kelompok Strategis

Secara mendasar, kelompok strategis memiliki banyak pengertian atau definisi. Biasanya, pemaknaan kelompok strategis bergantung dari ranah atau bidang keilmuan yang menelitinya. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, kelompok strategis

Analisis kelompok strategis pada mulanya dipublikasi oleh Hans-Dieter Evers pada tahun 1966 dan tahun 1973. Kajian menyeluruh dan mendalam mengenai kelompok strategis kemudian muncul melalui penerbitan buku karya Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel yang berjudul *Strategische Gruppen: Vergleichende Studien zu Staat, Bürokratie und Klassenbildung in der Dritten Welt* (1988) yang kemudian dialihbahasakan oleh Yayasan Obor Indonesia dengan judul *Kelompok-kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga* (1990).

Secara mendasar, kelompok strategis bukanlah elite ataupun kelas sosial. Mereka adalah kelompok lintas hirarkis yang anggotanya tidak membawa kartu atau bendera identifikasi, yang bahkan anggotanya bisa memiliki *lifestyle* dan keyakinan yang berbeda (Evers & Gerke, 2009: 3; Evers & Benedikter, 2009: 4). Kelompok strategis tidak mesti tergabung dalam satu organisasi, jejaring namun tidak menampik kemungkinan kelompok strategis tidak terkekslusi dari jejaring dan organisasi tersebut. Meskipun terkesan *fluid*, namun kelompok strategis ini diikat oleh satu kepentingan yang sama, yakni mengamankan akses terhadap sumber daya baik pada masa kini dan masa

mendatang; juga untuk berbagi kesempatan mengamankan apropriasi dan distribusi sumber daya. Apropriasi disini tidak melulu merujuk pada aspek sumberdaya material, namun juga sumberdaya immaterial, seperti kekuasaan, prestise, pengetahuan, jejaring (*networking*), dan lain sebagainya. Heberer (2003) menyebut tujuan umum kelompok strategis dapat terdiri dari kepentingan material (misalnya profit dan barang-barang material/ekonomi), kepentingan simbolis berupa prestise. Keller (dalam Heberer, 2003) menyebut ada tiga level symbol yang diperjuangkan, yakni simbol kognitif (profesionalisme dan pengetahuan), simbol moral (nilai dan sikap) serta simbol ekspresif (emosi, dan modus perilaku (*modes of behavior*)). Dengan demikian, kepentingan atau tujuan kelompok strategis dapat bersifat multidimensional, baik itu tujuan ekonomi, politik maupun sosial.

Kelompok strategis bukanlah kelas yang solid namun lebih dimaknai sebagai suatu kelompok yang dinamis; yang terus menerus mengalami perkembangan, perluasan, regresi atau bahkan penyempitan. Kelompok strategis kerap mengorganisir diri mereka dalam suatu asosiasi dan bertindak secara strategis pula. Tujuan strategis yang ingin dicapai bukanlah tujuan yang bersifat jangka pendek, karena mereka memiliki pemahaman internal mengenai eksistensi mereka, bahwa mereka adalah kekuatan esensial dalam konteks perimbangan kekuasaan dalam masyarakat (Heberer, 2003). Dalam konteks ini, kelompok strategis bisa berhadapan dengan kelompok strategis lainnya, melakukan negosiasi, aliansi, kerjasama, atau bahkan konflik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik dalam aspek ekonomi, sosial bahkan politik (Heberer, 2003).

Kemunculan kelompok strategis dapat disebabkan oleh perubahan atau transformasi sosial yang memunculkan peluang akses terhadap sumberdaya baru. Menurut Heberer (2003) kelompok strategis biasanya berupaya memperluas peluang untuk mengakses sumberdaya tersebut, melalui perubahan institusional sosial maupun politik atau apa yang disebut oleh Evers dan Benedikyer (2009) sebagai upaya membangun *superstruktur* atau sistem ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, Heberer pun menyebut kelompok strategis sebagai aktor politik.

Definisi Evers mengenai kelompok strategis yang bukan merupakan kelompok elite maupun kelas, kerap menimbulkan kebingungan. Bahkan dalam bab pendahuluannya dalam buku *Kelompok-kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga* (1990), Evers menyebut bahwa konsep kelompok strategis kerap dilihat sebagai versi terselubung untuk definisi teori kelas Marxis atau bahkan ia justru dilihat sebagai konsep penghianatan terhadap teori kelas Marxis demi kepentingan sosiologi borjuis (Evers & Schile, 1990: xviii). Hal ini kerap menyebabkan kesulitan dalam identifikasi kelompok-kelompok strategis. Namun Heberer (2003) memberikan rumusan sederhana untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Suatu kelompok dapat diidentifikasi sebagai kelompok strategis jika memenuhi lima elemen berikut yakni:

- a. Sebuah kelompok yang memiliki fungsi penting dalam pembangunan masyarakat secara luas, perubahan dan pembangunan politik.
- b. Bertindak secara strategis melalui kelompok kepentingan yang terorganisir dengan kapasitas atau daya tawar politik.
- c. Bertindak secara strategis dalam makna pengertian diatas dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan strategi formal maupun informal
- d. Organisasi kepentingan memiliki kapasitas dan kemampuan pengetahuan, perencanaan strategis dan kapasitas melaksanakan perencanaan tersebut.
- e. *Habits* dan perilaku anggota kelompok memiliki dampak atau efek terhadap pembangunan dan perubahan nilai.

Bagaimanapun juga, menurut Evers dan Schiel (1990: hal. xviii) kelompok-kelompok strategis dapat terbentuk secara khas di daerah yang terbukanya kesempatan untuk perolehan atau apropriasi sumberdaya yang baru. Hal ini dapat termasuk perubahan sosial karena masuknya teknologi modern (misalnya dalam kasus Revolusi Hijau), perubahan ekonomi dunia (misalnya transformasi kapitalisme global dan era episteme pembangunan dunia) serta model legitimasi teologi dan religious. Kelompok strategis berusaha mengembangkan atau mengubah kerangka persyarata untuk melanggengkan atau memperbaiki hasil apropriasi (Evers & Schiel, *ibid.*). Secara umum, kelompok strategis mengikuti dua strategi mendasar: yaitu

- a. Hibridisasi, yakni suatu perluasan hasil pengambilalihan ke daerah-daerah baru dengan memanfaatkan sumber pendapatan baru.
- b. Koalisi dengan cara kerjasama antarkelompok strategis dan juga melakukan simbiose. (Evers & Schiel, 1990: hal.xix).

2. Konsep-Konsep/ Definisi Operasional

Dalam KBBI disebutkan bahwa kode merupakan tanda (baik berbentuk kata-kata ataupun tulisan) yang penggunaannya telah disepakati untuk maksud dan tujuan tertentu. Kridalaksana (2008: 127) menyebutkan bahwa bahasa manusia dapat dikatakan sebagai sejenis kode; sistem bahasa dalam suatu masyarakat; atau variasi tertentu dalam suatu bahasa.

a. agensi perempuan: secara umum, agensi berkaitan dengan kapasitas untuk menentukan tindakan dan mengambil keputusan yang berkaitan kehidupan aktor tersebut. Kabeer (2015, dalam Ruwaida 2018) menyatakan bahwa konsep agensi merepresentasikan *power* atau kemampuan melakukan pilihan dan mempertimbangkan konsekuensinya. dalam konteks ini, agensi perempuan merujuk apada suatu pengertian kemampuan atau kapasitas perempuan dalam menilai, mempertimbangkan dan menentukan pilihan secara otonom yang berkaitan dengan kehidupan mereka, dan mampu mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut. Dalam makna lain, agensi berkaitan dengan partisipasi aktif. Dalam Ruwaida (2016), agensi bisa dimaknai secara positif dan negatif. Dalam makna positif, agensi berarti *power to* yang berarti kapasitas untuk melakukan sesuatu sedangkan dalam makna negatif, agensi dimaknai sebagai *power over* yang berarti menguasai, mendominasi, dan cenderung koersif. Kabeer

juga (dalam Ruwaida, 2016) juga memamparkan ada empat pilihan tindakan agensi yakni (1) agensi pasif (aksi dengan pilihan terbatas), (2) agensi aktif (bertujuan jelas) (3) agensi efektif (merujuk pada peran dan tanggung jawab) dan (4) agensi transformatif (perubahan; mampu menantang batasan peran dan tanggung jawab)

b. Arena dan tindakan strategis: arena strategis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arena pengambilan kebijakan (*decision making process*). sedangkan tindakan strategis adalah tindakan yang ditujukan untuk mengakses, memengaruhi proses pengambilan keputusan dan mengubah hasil proses pengambilan keputusan tersebut.

c. Jejaring Politik: adalah hubungan atau ikatan antara aktor-aktor politik yang memiliki tujuan atau visi politik yang sama. dalam konteks jejaring politik perempuan, jejaring politik dipahami ikatan atau relasi antar aktor yang relevan yang dapat membantu meningkatkan upaya pencapaian kepentingan politik perempuan, seperti partisipasi, kepemimpinan perempuan, dan lain sebagainya. aktor politik yang relevan ini bisa laki-laki ataupun perempuan, dapat melalui organisasi atau lembaga sipil (CSO), organisasi sayap perempuan maupun organisasi sayap partai politik lainnya, parlemen dan divisi atau biro yang ada di parlemen, ataupun kelompok yang mewakili pemangku kepentingan utama di parlemen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kritis. Pondasi paradigma kritis adalah teori Marxist yang emansipatoris, yang didalamnya meliputi neo-marxisme (new left), dan feminism. Perkembangan teori kritis sebagai paradigma tidak lepas dari peran Mazhab Frankfurt yang digawangi oleh Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, dan lain sebagainya. Pandangan paradigma kritis adalah menekankan bahwa ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideology-ideologi yang sudah ada dalam pembebasan manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan (Muslim, 2016: 80).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini hendak menggambarkan lebih jelas tentang fenomena-fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Kebanyakan penelitian sosial bersifat deskriptif, karena metode ini menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Moh. Nazir, 1981: 63). Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian serta analisis secara mendalam mengenai kelompok strategis perempuan yang tergabung dalam IWAPI NTB.

Secara umum, penelitian berlokasi di Nusa Tenggara Barat dengan situs penelitian Kantor IWAPI region NTB di Mataram. Lokasi pengambilan data bisa sangat bergantung dari lokasi subyek atau responden penelitian. Penelitian menentukan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Region NTB sebagai subyek organisasi didasarkan pemikiran IWAPI adalah representasi perempuan dalam bidang ekonomi. Karena menggunakan kelompok

strategis sebagai pendekatan, maka sasaran responden adalah adalah perempuan dalam posisi *leader rank* di IWAPI NTB.

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang dibutuhkan yakni: *pertama*, data primer dan *kedua*, data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan metode observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Aktivitas studi kepustakaan tersebut meliputi: pengumpulan dokumen-dokumen, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan arsip-arsip yang sesuai dengan objek kajian penelitian dan rumusan masalah yang akan dijawab.

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data: a) observasi; b) wawancara; dan c) dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan responden atau subyek penelitian. Metode ini digunakan terkait dengan pertanyaan dan kajian yang dibahas. Subyek yang disasar oleh penelitian ini adalah perempuan yang menduduki posisi *high rank* dalam IWAPI NTB. Para pemimpin ini dianggap sebagai *think thank* dalam menentukan strategi untuk membentuk dan menguatkan jejaring politik yang dianggap menjadi jalan dalam pencapaian kepentingan dan tujuan kelompok perempuan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif yakni suatu proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Proses analisis data di mulai dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber data baik yang diperoleh dari hasil obsevasi maupun wawancara yang telah ditulis dalam catatan lapangan dan proses penafsiran data. Teknik analisis data di lapangan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2014). Ada tiga alur atau proses dalam alur ini, *Pertama*, Mereduksi data (*data Reduction*) yakni suatu proses berpikir yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan. Hal ini bertujuan untuk merangkum, memilih hal-hal yang dianggap penting dan fokus pada tema penelitian. *Kedua*, penyajian data (*data display*) yakni dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antara kategori-kategori dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dengan teks yang bersifat naratif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan (*verification*) yakni dalam lingkup penelitian tersebut ditarik dari analisis data yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan bukti-bukti yang mendukung. Demikianlah teknik pengumpulan data yang akan penulis pergunakan dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) sebagai teknik untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas adalah atau yang disebut juga sebagai validitas internal bertujuan untuk menentukan apakah data dapat dinyatakan kredibel atau tidak. Suatu dapat disebut kredibel jika ada persamaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap subyek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Tujuan triangulasi data untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretif penelitian. Triangulasi adalah kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu.

Perempuan dalam Gerakan Ekonomi dan Politik

Perdebatan tentang Peran Perempuan dalam Ekonomi

Kiprah perempuan dalam ekonomi sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang. Dalam konteks dunia, perempuan telah terlibat dalam aktifitas ekonomi terutama di sektor pertanian, baik sebagai pekerja keluarga maupun sebagai buruh. Revolusi industri pun semakin membuka peluang perempuan terlibat aktif dalam ekonomi. Perkembangan industri pada era revolusi industri, terutama disektor industri rumah tangga banyak memperkerjakan perempuan sebagai buruh, hal ini dikarenakan sektor tersebut memproduksi makanan, tekstil maupun perangkat makan. Dominanya buruh perempuan disektor tersebut dikaitkan dengan feminine skill yang dimiliki perempuan, yakni keterampilan khas perempuan yang berkaitan dengan aspek nurturing dan peran tradisionalnya dalam rumah tangga seperti memasak, menjahit, dan lain sebagainya.

Perkembangan kapitalisme memberikan konteks perubahan peran ekonomi perempuan. Dalam era pra kapitalisme, dimana struktur ekonomi masih bercorak ekonomi feodalistik, peran perempuan berkuat pada peran domestik. Jika pun terlibat dalam aktifitas produksi, peran ekonomi perempuan kerap sekali sebatas membantu atau pekerja keluarga yang tidak diupah. Ketika kapitalisme industri berkembang, kiprah ekonomi perempuan pun semakin meningkat dan terlibat dalam rantai produksi kapitalisme. Masuknya perempuan dalam pasar tenaga kerja, memberikan keuntungan bagi kapitalisme dan memandangnya sebagai cadangan tenaga kerja murah.

Perempuan dalam kapitalisme sesungguhnya merupakan topik perdebatan yang tak usai dalam lingkup teoritis feminisme. Pertanyaanya kerap berkuat mengenai apakah kontribusi dalam ekonomi mampu membebaskan perempuan dari siklus subordinasi dan eksploitasi.

Dalam perspektif kajian feminis liberal, akses perempuan dalam ekonomi adalah salah satu aspek mendorong kesetaraan perempuan. Dalam pandangan feminis liberal, partisipasi dan akses ekonomi perempuan adalah bagian dari hak dasar yang diakui oleh hukum. Dalam pandangan perspektif liberal, opresi perempuan dapat diakhiri jika perempuan diberikan hak yang sama untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam struktur maupun nilai-nilai publik. Dengan demikian, peran perempuan dalam ekonomi tidak saja dipandang sebagai bentuk penegakan hak perempuan, namun juga sebagai upaya memutus siklus ketergantungan dan kekerasan terhadap perempuan.

Pun ketika perempuan berpartisipasi dalam sektor ekonomi dengan menjadi buruh tidak membuat marginalisasi perempuan berakhir, namun justru semakin menguatkan eksploitasi perempuan oleh kapitalisme. Ketika menjadi buruh, peran perempuan dalam produksi justru menguntungkan kapitalisme karena biasanya buruh perempuan diupah rendah. Masuknya perempuan menjadi buruh justru memberikan cadangan buruh murah yang tak terbatas bagi kapitalisme. Masuknya perempuan sebagai buruh murah cadangan kemudian akan mengancam eksistensi buruh secara umum karena *bargaining position*

kapitalis semakin menguat. Kelas kapitalis akan semakin semena-mena dan eksploitatif kepada buruh karena pengganti buruh tersedia tidak terbatas.

Dengan demikian, eksploitasi perempuan dalam pandangan feminis Marxis tidak akan pernah berakhir selama struktur kapitalisme tidak digantikan. Hal ini dikarenakan penindasan perempuan itu bersifat struktural, oleh karenanya satu-satunya hal logis agar penindasan itu berakhir adalah mengakhiri struktur kelas melalui revolusi sosial menuju masyarakat bebas atau tanpa kelas.

Dari pemaparan diatas setidaknya dapat kita lihat bahwa eksploitasi ekonomi adalah representasi kapitalisme dan opresi adalah struktur dasar patriarkal, maka dapat dilihat suatu kesimpulan bahwa kapitalisme tidaklah terpisah dengan ideologi patriarki. Pada konteks ini, feminis sosialis mengakui bahwa tingkat partisipasi berkorelasi dengan rendahnya status perempuan (Fakih, 2010: 91), namun pada saat yang sama rendahnya status perempuan menghambat mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan publik. Dalam masyarakat yang patriarkal, ideology patriarkal tidak saja membentuk konstruksi identitas perempuan namun juga laki-laki. Ideology patriarkal memengaruhi bagaimana perempuan memposisikan dirinya dalam relasi sosial, privat dan juga membentuk dan memengaruhi harapan, capaian dan cita-cita mereka. Secara sederhana, opresi perempuan kerap menyebabkan jeratan eksploitasi ekonomi semakin tajam, sebaliknya semakin kuat jeratan eksploitasi ekonomi, semakin memperkuat jeratan opresi perempuan. Dengan demikian, opresi tidak bisa direduksi maknanya dalam konsep eksploitasi (ekonomi), karena opresi perempuan tidak sekadar berakar dari posisi kelasnya namun juga posisinya dalam struktur pembagian seksual, yakni patriarki.

Dalam sistem patriarkal, definisi seksual perempuan istri dan ibu membentuk peran dan tujuan utama perempuan adalah tujuan atau peran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga yang artinya perempuan harus melakukan pekerjaan domestik tanpa upah. Struktur patriarkal yang hirarkis, peran perempuan sebagai ibu membentuk inferioritas seksual karena membentuk pembilahan atau pembagian arena kerja bagi dua kelompok jenis kelamin; public adalah arena laki-laki dan keluarga maupun rumah tangga adalah arena perempuan. Hal ini semakin menyebabkan perempuan terasing dari arena produksi dan arena publik. Kondisi inipun memperparah ketidaksetaraan seksual.

1. Perempuan dalam Eksploitasi Kapitalisme

Dari uraian diatas dapat dilihat keterkaitan antara kapitalisme dan patriarki sebagai sumber ketertindasan perempuan. Keduanya memiliki relasi yang cukup pelik, dimana pada satu konteks, seperti yang dijabarkan Mitchell, kapitalisme turut menopang patriarki; dan patriarki pada suatu konteks tertentu memberi keuntungan pada kapitalisme. Dengan demikian, kapitalisme bukanlah sebab tunggal ketertindasan perempuan, namun juga disebabkan oleh patriarki. Inilah basis argumentasi teori *dual system*.

Namun demikian, pertanyaan pun muncul. Apa upaya yang tepat untuk memutus tali opresi perempuan? Menjadi anti kapitalisme, atau revolusi sosial dan budaya, meruntuhkan patriarki?

Menurut Adam Smith, Kapital tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai uang, atau dalam bahasa Smith, ia bukanlah sekadar uang untuk membeli komoditas. Smith menuturkan, aspek kritis dari kapital tidaklah terletak pada hak untuk menggunakannya; namun pada hal untuk menahan penggunaannya ketika pemiliknya menghendaki. Dominasi tercipta ketika pemilik kapital menolak memperkerjakan manusia sehingga menyebabkan pekerja kelaparan.

Namun menurut Ellen Woods, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi-politik yang secara kualitatif berbeda dan terpatah dari sistem-sistem sebelumnya. Senada dengan Smith, kapital tidak bisa direduksi sebagai kepemilikan material, namun menurut Woods, ia adalah suatu hubungan sosial yang spesifik. Dengan demikian, akumulasi kapital atau kepemilikan kapital secara masif oleh individu tidak secara otomatis membentuk kapitalisme; sebab yang diperlukan oleh kapitalisme adalah perubahan hubungan sosial yang menghidupkan “daya gerak” kapitalisme; paksaan persaingan, maksimalisasi profit, keharusan menginvestasikan laba dan tak henti memaksimalkan produktifitas tenaga kerja serta pengembangan produksi (Woods, 2002 dalam Karimasari, 2016).

Dengan demikian, kapitalisme tidaklah muncul otomatis sebagai konsekuensi kepemilikan properti ataupun sistem produksi. Yang menenunkan kemunculan kapitalisme adalah apakah kepemilikan pribadi menjadi kekuatan politik bagi si pemilik untuk memaksakan proses produksi demi pemenuhan kepentingannya. Dengan demikian, anti kapitalisme bukanlah anti produksi, atau anti kepemilikan pribadi atau anti pasar. Pandangan anti-kapitalisme pada dasarnya mengkritik dalil efisiensi, produktifitas dan kompetitif yang disebutkan sebagai dalil paksaan pasar. Dalil anti-kapitalisme sesungguhnya berupaya mencari formulasi sistem ekonomi politik yang tidak berlandaskan pada maksimalisasi profit dan persaingan dalam pasar, namun lebih pada nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai upaya melunakkan Ortodoksi Ekonomi Pasar

Dengan meminjam dalil Woods mengenai anti-kapitalisme sebagai upaya formulasi ekonomi-politik, dalam hemat penulis memiliki konsekuensi gerakan anti kapitalisme beririsan dengan gerakan dan agenda politik. Woods menyebutkan bahwa kapitalisme sesungguhnya amat bergantung dari kondisi-kondisi ekstra-ekonomi, seperti dukungan politik dan hukum (Woods, 2002: 179). Kapitalisme sangat membutuhkan stabilitas yang terorganisir secara politik maupun hukum, yang dapat memberikan kepastian keteraturan dan tatanan sosial yang dapat diprediksi. Keterkaitan dan kebutuhan kapitalisme terhadap kewenangan negara untuk memberikan stabilitas hukum dan politik

ini membuka peluang hadirnya negara dalam mengontrol ortodoksi pasar dalam kapitalisme. Meminjam gagasan Karl Polanyi, hadirnya negara dalam pasar bukanlah menghendaki negara yang otoritarian dengan intervensi yang berpunggunan dengan prinsip demokrasi. Bagi Polanyi, mengatur pasar berarti menempatkan pasar dibawah kendali masyarakat demokratis; artinya pasar sempurna adalah mitos, dan pengawasan terhadapnya akan mengembalikan fungsi pasar yang semula, yakni sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan hidup; bukan pencarian keuntungan dan menumpuk modal sebanyak-banyaknya.

Pengelolaan ekonomi yang demokratis merupakan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan paada kesetaraan dan peran atau partisipasi seluruh rakyat. Demokrasi ekonomi menghendaki keadilan sebagai *value* atau nilai moral utama dalam ekonomi. Prinsip demokrasi ekonomi menekankan bahwa penyelenggaraan ekonomi haruslah bertujuan untuk membangun kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran individu. Oleh karena itu, dalam lingkup pemahaman demokrasi ekonomi, negara memenuhi fungsi *active guardiance* memastikan akses yang setara bagi semua individu terhadap sumber daya, dan menjamin kebebasan individu untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya sembari memastikan kebebasan tersebut tidak mendorong monopoli dan dominasi suatu kelompok.

Dalam konteks ini, negara mesti hadir sebagai *corrector* pasar manakala pasar telah menunjukkan tidakadilan, salah satunya bentuknya adalah menampilkan kebijakan yang afirmatif bagi kelompok-kelompok yang rentan. Salah satu bentuk kebijakan afirmatif itu adalah kebijakan subsidi atau mekanisme pemberdayaan ekonomi.

Secara mendasar, arti pemberdayaan diterjemahkan dari bahasa *empowerment* yang berarti kemampuan. Dalam padangan Suzanne Kindervatter (1979) pemberdayaan berkaitan dengan mendapatkan dan memahami, dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan peran atau posisi suatu kelompok dalam masyarakat. Lebih terang, Aritonang (dalam Megawangi, 1999 dalam Hasanah, 2013), pemberdayaan berarti upaya peningkatan kemampuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk meraih akses dan penguasaan terhadap posisi pengambil keputusan, sumber, struktur dan jalur-jalur yang menunjang. Dengan demikian ada dua poin utama terkait pemberdayaan, yakni akses dan kontrol terhadap sumber daya. Akses diartikan sebagai kesamaan hak dalam akses sumber daya; dan kontrol diartikan sebagai kewenangan penuh untuk memutuskan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah suatu proses pembentukan kesadaran dan kapasitas (*capacity building*) untuk mendorong partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya.

Pemberdayaan ekonomi perempuan dipandang krusial dikarenakan perempuan menjadi kelompok marjinal yang menikmati minimnya akses terhadap berbagai sektor. Dalam laporan Kesenjangan Gender Global yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada tahun 2022, Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697, dan berada di peringkat 92 dari tahun 146 negara. Skor indeks ketimpangan diukur dari

skala 0-1, dimana “1” menunjukkan tercapainya kesetaraan secara penuh. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sektor politik mendapat skor kesetaraan yang paling rendah, yakni 0,169, atau di bawah rata-rata global. Sedangkan pada sektor ekonomi, Indonesia meraih skor 0,674.

3. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, yang disingkat IWAPI, salah satu wadah kesatuan wanita pengusaha di Indonesia, Organisasi ini semula bernama IPWI (Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia), secara resmi dibentuk pada tanggal 10 Februari 1975, di Jakarta atas Prakarsa dua orang wanita pengusaha, yakni Kemala Motik Amongpradja dan Dewi Motik Pramono bersama beberapa pengusaha lainnya. Pendirian IWAPI pada dasarnya berawal dari kerisauan mengenai tidak solidnya para perempuan pengusaha. Meski sama-sama berkiprah dalam bidang ekonomi, mereka berjalan sendiri-sendiri dan terpisah satu-sama lain. Hal ini disebabkan karena minimnya wadah yang menghimpun para pengusaha perempuan, padahal jika para pengusaha perempuan itu terhimpu dalam suatu wadah, maka akan memungkinkan terjalinnya kerjasama yang terkoordinasi di segala bidang, dan akhirnya menciptakan sinergi yang lebih baik.

Gagasan untuk menghimpun para wanita pengusaha Indonesia pun diutarakan ke beberapa wanita pengusaha lainnya seperti Mirta Kartohadiprodjo, Dotty Ibnu Sutowo, Linda Spiro, Linda Latief, Astari Harun Alrasyid, Astrid Soerjantono Soerjo, Ratih Dardo, dan Niniek Soerjo Adiwrsita yang kemudian gagasan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IPWI) pada tanggal 10 Februari 1975. Pada Musyawarah Nasional 1 IPWI yang diselenggarakan pada tahun 1978 dan secara resmi nama IPWI diubah menjadi IWAPI. Adapun tujuan pendirian organisasi ini adalah, *pertama* membina persatuan dan kerjasama para wanita pengusaha Indonesia di bidang ekonomi dan usaha atau bisnis. *Kedua*, meningkatkan pengetahuan serta keterampilan sebagai pengusaha, dan ketiga, meningkatkan peran serta wanita Indonesia dalam pembangunan.

Pada tahap selanjutnya IWAPI bergerak cepat dan melebarkan kiprahnya dalam memberdayakan ekonomi perempuan. Selain meluaskan jangkauannya melalui pendirian cabang diseluruh nusantara, IWAPI juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelbagai program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain bekerja sama dengan Badan Pengembangan Ekspor Nusantara (BPEN), serta membina hubungan dengan bank-bank pemerintah dan swasta, serta menggelar berbagai pelatihan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pembinaan dan bahkan mendirikan Pusat Pendidikan IWAPI (1979) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya. Kini anggota IWAPI telah mencapai 30.000 yang tersebar di 36 propinsi.

IWAPI menyadari bahwa meski memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, namun perempuan pengusaha pada kenyataanya

menghadapai berbagai kendala dan tantangan, baik itu dari segi akses permodalan, kapasitas pengetahuan terhadap upaya peningkatan mutu SDM dan produk, lemahnya kapasitas manajemen hingga akses pasar. Oleh karenanya, IWAPI tidak saja Menghimpun, membina, memfasilitasi, memberikan solusi dan memotivasi anggotanya namun juga turut aktif memberi masukan dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya-upaya penguatan kapasitas dan kesetaraan akses ekonomi bagi pengusaha perempuan.

Komitmen dan tekad untuk membantu pengusaha wanita pun diwujudkan antara lain mencari kerjasama secara terstruktur, efektif, kreatif dan agresif dengan pihak-pihak ke tiga, diantaranya: Pemerintah, perbankan, sesama Asosiasi dan pihak Swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal inipun sejalan dengan misi IWAPI yaitu 1) IWAPI memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan di dalam UKM melalui peningkatan kemampuan anggota untuk mengelola usaha anggota, mendapatkan akses terhadap teknologi baru, pemasaran dan pembiayaan. 2) IWAPI memperjuangkan annggotanya dengan berbagai cara antara lain advokasi, pelatihan (ketrampilan teknis, manajemen dan sumber daya manusia), dan networking.

4. Kesadaran Perempuan Anggota IWAPI NTB untuk Berkiprah dalam Politik

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, IWAPI adalah suatu organisasi non-profit yang mewadahi perempuan pengusaha untuk menjalin kerjasama, sinergi dan membantu perempuan untuk mengakses modal, keterampilan dan pengetahuan. Apalagi 98 persen anggotanya adalah perempuan pengusaha disektor UMKM yang mengalami berbagai keterbatasan dalam mengembangkan potensi usahanya. Dalam kiprahnya, IWAPI dapat dikatakan fokus pada peran-peran advokasi perempuan dalam isu-isu sosial terutama isu pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam konteks ini, posisi IWAPI secara formal dapat dikatakan berjarak dengan politik, apalagi dalam AD/ART-nya menekankan porsi mereka dalam perannya yang berkaitan dengan pemerintah, yakni menjadi mitra bagi pemerintah, dan memberi kontribusi, ataupun masukan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi perempuan dan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan pengusaha perempuan.

Dalam makna politik yang lebih luas, politik tidak selalu dibayangkan sebagai upaya atau arena yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan, posisi politik atau aspek elektoral. Politik juga bermakna advokasi; berkaitan dianggap berjarak dengan politik dan menegaskan posisi IWAPI sebagai organisasi yang fokus pada isu-isu sosial dan pemberdayaan ekonomi. IWAPI dalam AD/ART nya menekankan porsi mereka dalam perannya yang berkaitan dengan pemerintah, yakni menjadi mitra bagi pemerintah, dan memberi kontribusi, ataupun masukan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi perempuan dan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan pengusaha perempuan.

Penggalan informasi mengenai kesadaran anggota IWAPI NTB untuk berkiprah dalam politik dilakukan melalui wawancara dengan konsep diskusi terbuka dengan Ketua DPP IWAPI NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi. Ketua DPP IWAPI ini pada dasarnya

merupakan politisi perempuan kawakan, yang terpilih sebagai anggota DPD RI selama 2 periode, 2009-2014, dan 2014-2019. Sebelum terjun ke politik, latar belakang Baiq Diah adalah pengusaha di sektor kerajinan gerabah, anyaman dan ukiran, dan sejak tahun 1990-an menekuni sektor kerajinan tenun yang membawanya mendirikan Bale Gaye Ratu Emas yang menyediakan ruang bagi industri kerajinan tenun perempuan NTB.

Fokus Baiq Diah pada pemberdayaan ekonomi sesungguhnya dimulai jauh sebelum menapaki karir politik. Berasal dari keluarga yang dikenal sebagai pengusaha kerajinan di NTB, ia aktif melakukan pembinaan keterampilan untuk perempuan dalam mengembangkan potensi ekonomi. Ia pun memiliki sejumlah pengrajin dan pengusaha kecil binaan yang tersebar di NTB.

Sebagai seorang politisi, tentu ketua IWAPI NTB ini menyadari betapa pentingnya perempuan berpartisipasi dalam politik. Peran aktif perempuan dalam politik bertujuan untuk memastikan regulasi dan aturan-aturan selaras dengan hak-hak dan kepentingan perempuan secara umum, dan pengusaha secara khusus. Secara khusus, perjuangan kepentingan perempuan tidak bisa dibatasi dalam kerja-kerja yang ekstra parliementarian, justru perjuangan perempuan harus menjajaki jalur parlementarian untuk memastikan kebijakan dan regulasi yang bisa mengakomodir kepentingan. Tanpa adanya legislasi yang berpihak pada perempuan, pencapaian kepentingan-kepentingan perempuan tidak bisa terwujud secara maksimal.

Perkenalan Baiq Diah kepada politik sesungguhnya dimulai ketika masih kanak-kanak. Ayahnya, Lalu Djapa atau dikenal sebagai Mamiq Rumakse pernah menduduki posisi Kepala Djawatan Penerangan Lombok Barat pada tahun 1951-1954, dan pada tahun 1966 terpilih menjadi Anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) NTB dari PNI. Lalu Djapa kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD Lombok Barat (1960-1967), dan anggota DPRD NTB (1971-1977). Meski akrab dengan politik sedari kecil, namun dorongan untuk terlibat aktif dalam politik, tidak berasal dari keluarga. Dalam pengakuannya, kiprahnya dalam politik adalah unsur ketidaksengajaan yang bermula dari ajakan kawan. Dalam konteks politik, perubahan UU Pemilu mengenai pemenuhan aspek keterwakilan perempuan. Dalam UU Pemilu No. 10 tahun 2008 pasal 53 dinyatakan bahwa *“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”*. Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih maju lagi dalam affirmative action adalah adanya penerapan zipper system. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan: *„Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal*

calon^{***}. Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.

Dalam konteks pemenuhan syarat keterwakilan ini, pada saat itu partai politik bersikap pragmatis dengan mencalonkan kandidat peserta pemilu yang sifatnya non-kader. Meski tidak berasal dari partai politik, Baiq Diah memenangkan kursi DPD RI. Setelah menjadi senator, kesadaran untuk berperan dalam politik semakin menguat. Hal ini dikarenakan, ketika menjabat sebagai senator Baiq Diah memandang memiliki lebih banyak peluang untuk membantu perempuan memperjuangkan kepentingannya. Terbukti, pada tahun 2020 ia menjadi calon walikota Mataram berpasangan dengan Baihaqi, dan tahun 2023 tercatat sebagai caleg DPR RI dapil 2 NTB Pemilu 2024.

Dalam penjabarannya mengenai keterlibatan aktif perempuan dalam politik, secara umum banyak anggota IWAPI menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Namun kerap kali, kesadaran ini tidak dapat dimanifestasikan dalam lingkup gerak atau keterlibatan aktif dalam politik. Dalam pandangannya, hal ini disebabkan karena persoalan internal perempuan itu sendiri yang memiliki kekhawatiran keterlibatannya dalam politik dapat mengganggu pemenuhan perannya dalam ruang domestik. Rasa bersalah karena kesibukan sehingga merasa tidak dapat mengurus anak dan suami kerap melanda anggota IWAPI dan menjadi biang urungnya perempuan terlibat aktif secara politik. Disisi lain, beberapa anggotanya juga memiliki kendala dalam aspek izin dari suami.

Hal inipun terkonfirmasi dari wawancara narasumber (Ny. F), anggota IWAPI Kota Mataram yang menyatakan keengganannya untuk terlibat dalam politik karena faktor kesibukan. Baginya menjadi pengusaha saja sangat membuatnya kerap meninggalkan keluarga, apalagi terlibat dalam politik yang seringkali menyita waktu. Dalam pandangan narasumber, perempuan *memang* membutuhkan representasi di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan perempuan; namun bagi narasumber kami, memberikan kontribusi bagi perempuan tidak melulu melalui jalur politik, namun juga jalur pemberdayaan ekonomi, seperti IWAPI. Dalam diskusi selanjutnya, membangun karir politik tidaklah mudah dan cenderung menghabiskan waktu dalam perdebatan yang berkepanjangan. Ia merasa tidak cukup cakap dalam politik. Namun, meski tidak terlibat langsung dalam politik, banyak rekan lain yang memiliki minat untuk terlibat aktif dalam politik. Dalam konteks keorganisasian, IWAPI sangat terbuka dan tidak bersikap diskriminatif terhadap anggota yang berkiprah dalam politik.

5. Strategi Perempuan Membangun Jejaring Politik melalui Bisnis

Asumsi awal penelitian ini adalah anggota IWAPI dapat memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk membangun jejaring politik. Dalam konteks ini, IWAPI sebagai wadah bagi perempuan pengusaha dapat menjadi sasaran bagi politisi untuk meraup dukungan, namun pada saat yang sama, anggota IWAPI yang berpolitik dapat memanfaatkan

keanggotannya untuk mendapatkan dukungan dari politisi maupun anggota organisasi lain di luar IWAPI.

Mengkonfirmasi asumsi ini, narasumber tidak begitu gamblang menjelaskan namun lebih mengajukan pandangan yang moderat kaitan antara IWAPI dan politisi maupun pengusaha. Secara organisasional, IWAPI adalah lembaga non-profit yang memiliki misi mewadahi kelompok pengusaha perempuan. Fokus utama IWAPI adalah advokasi dan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi. Dengan demikian, secara organisasional IWAPI memiliki sikap yang tegas terhadap keterkaitannya dengan politik ataupun politisi.

Narasumber mengakui bahwa kiprah di IWAPI memberikan akses yang signifikan terhadap perluasan jaringan anggotanya, baik secara politik maupun dalam konteks kepentingan bisnis individu. Namun terbukanya akses ini sangat bergantung dari diri individu masing-masing, bagaimana ia bisa memanfaatkan jaringan itu untuk kepentingannya sendiri.

Narasumber mengakui, IWAPI kerap didekati oleh kelompok politisi namun pada konteks ini, relasi dengan politis, senator dan lain sebagainya terbatas pada konteks penguatan kerjasama dalam mendorong kebijakan yang terkait pemberdayaan perempuan. Dalam konteks komunikasi formal, pembicaraan IWAPI sebagai wadah penggalangan suara dan dukungan bagi politisi lain tidak dilakukan.

Pada sisi lain, anggota-anggota IWAPI yang tergabung dalam politik tidak mengandalkan IWAPI sebagai wadah meraup suara. Hal ini dikarenakan, afiliasi politik anggota IWAPI sangat beragam dengan pilihan partai yang berbeda. Dengan demikian, ada kekhawatiran muncul jika dukungan itu diutarakan secara nyata melalui mobilisasi anggota IWAPI, tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi anggota IWAPI, yang mungkin berafiliasi dengan partai politik yang berbeda dengan anggota IWAPI yang didukung tersebut. Akibatnya, anggota IWAPI yang menapaki jalan politik mengandalkan jejaring dari luar IWAPI itu sendiri, seperti jaringan keluarga, ataupun jaringan yang diupayakan melalui aktivisme politik secara mandiri.

Namun, IWAPI tidak melupakan perannya dalam aspek advokasi. Beberapa petinggi DPC IWAPI memandang perlu untuk membuat suatu wadah bagi anggotanya, dimana wadah tersebut fokus pada aspek pendidikan politik bagi anggotanya. Wadah ini sesungguhnya bukan bagian dari struktur organisasi formal IWAPI, namun lebih pada inisiatif personal beberapa anggota IWAPI yang memiliki pandangan bahwa kiprah perempuan tidak terbatas pada sektor ekonomi saja. Pendidikan politik bagi perempuan tidaklah melulu berkaitan dengan kaderisasi politik, namun lebih pada aspek penyadaran atau advokasi perempuan dalam mengawal kebijakan-kebijakan negara. Memiliki kesadaran politik tidak selalu diimplementasikan dalam aktivisme kontestasi politik seperti menjadi caleg, namun lebih pada aspek memupuk basis kesadaran perempuan terhadap peristiwa politik dan proses pengambilan kebijakan, yang kemudian

menumbuhkan kesadaran yang otentik, generik untuk mengawasi penyelenggaraan negara dan proses pembuatan kebijakan (*decision making process*).

Meski secara tidak langsung mengakui, namun dari uraian diatas terutama yang berkaitan dengan aspek upaya pendidikan politik, para anggota IWAPI dapat saja menggunakan IWAPI secara samar untuk menggalang dukungan politik. Wadah pendidikan politik dapat menjadi ruang pertukaran gagasan, atau bahkan sosialisasi kandidasi seorang kandidat politik. Selain itu, narasumber mengakui bahwa meski pilihan politik anggota IWAPI masih dipengaruhi oleh pilihan politik keluarganya, namun dalam konteks tertentu, IWAPI bisa membangun benteng solidaritas dan dukungan (politik) bagi perempuan.

6. Pemetaan Politik

Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa IWAPI dalam konteks organisasional tidak berafiliasi dengan politik. Namun demikian, kedekatan jaringan dengan kelompok politisi, birokrat dan bahkan legislator memberikan peluang bagi IWAPI untuk memiliki kontribusi dalam memengaruhi kebijakan dan dukungan kepada IWAPI. Menurut narasumber, ini dapat dikatakan sebagai *institutional benefits*, dimana IWAPI dianggap lebih memiliki *bargaining position* karena skala organisasi yang cukup besar.

Dalam konteks organisasi, IWAPI tentunya melakukan pemetaan secara strategis mengenai rencana-rencana program, sasaran *stakeholders*, ataupun lembaga-lembaga yang dianggap dapat memberikan dukungan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi, sehingga IWAPI dapat berperan sebagai mitra.

Dalam konteks individu, yakni anggota IWAPI pemetaan jaringan politik sangat bergantung dari kapital atau sumber daya serta pengalaman politik yang dimiliki oleh anggota tersebut. Beberapa anggota IWAPI yang juga merupakan politisi kawakan, yang memiliki sumber daya yang baik, melakukan pemetaan jaringan politik dapat dilakukan dengan bantuan konsultan atau tim politiknya, atau bahkan mendapat bantuan dari partai politik yang menaunginya.

A. Perempuan Sebagai Kelompok Strategis: Mode Apropiasi Kepentingan Perempuan

Evers dan Gerke (2009: 5-9) menyatakan bahwa apropriasi kepentingan oleh kelompok strategis tidak selalu dalam bentuk keuntungan jangka pendek atau keuntungan yang bersifat langsung dan segera, namun kelompok strategis menjejaki strategi jangka panjang, misalnya merubah atau membentuk suatu struktur sosial, ekonomi dan politik atau perubahan institusional untuk meningkatkan kesempatan atau akses terhadap sumber daya tertentu. Bagaimanapun juga, kelompok strategis ini bukanlah kelompok elite atau kelas sosial, mereka adalah kelompok yang melintasi hirarki, tidak terafiliasi secara formal dengan suatu organisasi tertentu, namun mereka terikat dengan nilai-nilai bersama, ideologi, dan kepentingan yang sama. Ketidakterikatan anggota kelompok strategis pada institusi atau organisasi tertentu menyebabkan kelompok strategis pada

dasarnya adalah kelompok yang rapuh, namun Evans dan Gerke (2009:8) menegaskan bahwa kesamaan nilai, ideologi dan kepentingan justru menjadi daya ikat yang kuat (*powerful binding forces*) bagi keberlangsungan kelompok ini.

Dari definisi ini, perempuan secara umum dapat dikatakan sebagai kelompok strategis, dan perempuan memiliki suatu kepentingan bersama; yakni memastikan sistem ekonomi dan politik memberikan ruang bagi pemenuhan hak dan kepentingan perempuan secara umum. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa perempuan bukanlah kelompok yang bersifat monopolitik, yang bisa dikelompokkan dalam satu identitas dan kepentingan saja; perlu juga diakui bahwa perempuan dapat bergabung dan berafiliasi dengan kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda pula. Evans dan Gerke (2009:8) menegaskan bahwa kelompok strategis ini melampaui batasan-batasan sosial, kelas maupun stratifikasi sosial namun kadang kala, kekerabatan juga bisa menjadi daya ikat kelompok ini. Evans (1990) pun menyebutkan bahwa ada beberapa tipe kelompok strategis, yakni birokrat; militer, profesional, intelektual dan kelompok bisnis. Dengan pembagian tipe ini, IWAPI dapat dikelompokkan sebagai kelompok strategis perempuan yang berasal dari kelompok bisnis (perempuan). Sebagai organisasi kelompok perempuan pengusaha, tentunya kepentingan utama mereka adalah memastikan dan mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penguatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun demikian, dari studi yang dilakukan, peneliti berpandangan bahwa baiknya membedakan kepentingan perempuan sebagai organisasi IWAPI dan kepentingan perempuan sebagai individu politik.

Dalam konteks organisasional, telah disebutkan bahwa IWAPI dapat dikatakan berjarak secara politik dan tidak menunjukkan afiliasi politik yang lugas dengan partai politik tertentu. Namun bukan berarti IWAPI tidak berpolitik. *Pertama*, jika politik dimaknakan sebagai advokasi dan bukan melulu sebagai kerja elektoral, maka upaya advokasi ekonomi IWAPI juga dimaknakan sebagai kerja politik IWAPI. Disisi lain, IWAPI menempatkan posisi sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan pada dasarnya merupakan apropriasi kepentingan dari IWAPI sendiri. Sebagai mitra pemerintah, IWAPI dapat mengakses alokasi pendanaan program-program terkait penguatan ekonomi perempuan, ataupun akses informasi mengenai kebijakan ataupun program pemerintah. Misalnya pada era Orde Baru (menjelang reformasi), menjadi mitra utama pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Narasumber menyatakan bahwa pada masa itu, IWAPI memiliki program truk sembako, yang komoditasnya disediakan negara. IWAPI diberikan akses terhadap harga komoditas yang lebih murah, dan berbagai alokasi pendanaan dan bantuan untuk program-program yang digagas IWAPI.

Kedua, dalam upaya pencapaian apropriasi kepentingan itu atau mengamankan akses terhadap sumber daya tertentu, persoalan mengenai siapa atau aktor yang berperan utama tidaklah relevan; namun kelompok strategis tidak segan mendukung aktor-aktor tertentu; baik itu kelompok kepentingan ataupun elite yang dianggap

mendukung atau memperjuangkan kepentingan kelompok ini. Ini berarti, sebagaimana yang telah disebutkan Evans bahwa kelompok strategis dapat menjalankan strategi kerjasama, hibridisasi, kompetisi ataupun pemberontakan dengan atau terhadap kelompok strategis lainnya atau bahkan individu. Pada konteks ini, kepentingan individu atau aktor ataupun kelompok strategis lainnya dapat beriringan dengan kelompok strategis itu dan membentuk relasi yang bersifat saling menguntungkan.

Keterhubungan IWAPI dengan pemerintah melalui relasi kemitraan, tidak hanya memberikan IWAPI sebagai suatu organisasi terhadap akses sumber daya; namun juga memberikan peluang bagi anggota individu atau anggota IWAPI untuk membangun jejaring (*network*) secara personal dengan anggota pemerintahan atau kelompok birokrasi pemerintahan; yang jejaring ini dapat memiliki kontribusi bagi perluasan bisnis anggota kelompok strategis itu. Hal ini pada dasarnya terhubung dengan mode apropriasi (*modes appropriation*) yang terdiri dari personal, korporat dan kolektif (Evans & Gerke, 2009:9).

Pada mode apropriasi personal, yakni dimana suatu kelompok memperoleh pendapatannya melalui apropriasi personal (misalnya pengacara atau pedagang kecil), kelompok strategis cenderung memilih jalur sistem politik dimana partai politik memainkan peran untuk mencapai kepentingan mereka. Artinya, bisa saja kelompok ini membentuk partai politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu, selain membentuk organisasi spesifik lainnya. Sedangkan mode apropriasi korporat (misalnya kelompok industri, entrepreneur atau para pebisnis), tujuan mereka salah satunya adalah memperluas kepemilikan dan kontrol terhadap alat-alat produksi dengan cara ekspansi organisasi (korporasi) atau bahkan mereka dapat memperoleh dukungan politik melalui sistem patronasi, *kinship*, atau jejaring sumber daya (*resource network*). Pada mode apropriasi kolektif (biasanya kelompok birokrat dan militer), apropriasi kepentingan mereka cenderung bersifat *power-base* dengan mempertahankan atau memperluas organisasi (negara) mereka untuk mengakses kontrol terhadap sumber daya.

Dari pemaparan mengenai mode apropriasi kepentingan tersebut, IWAPI dapat dikategorikan sebagai kelompok strategis yang menganut strategi mode apropriasi personal dan korporat. Penulis berargumen bahwa adopsi mode apropriasi ini bisa berbeda, bergantung dari posisi dan skala industri anggota IWAPI itu sendiri.

Dari pemaparan data, berjuang melalui jalur politik baik itu tergabung dengan partai politik dan berpartisipasi dalam politik elektoral menjadi anggota legislatif merupakan corak apropriasi mode personal. Sebagai informasi Ketua IWAPI NTB (Ibu Baiq Diyah Ratu Ganefi) maupun Ketua Umum IWAPI (Ibu Nita Yudhi atau Dyah Anita Prihapsari) mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD dan anggota DPRD, begitu pula dengan anggota IWAPI lainnya. Melalui partai politik dan menjadi anggota legislatif, perempuan dalam IWAPI dapat memperjuangkan perubahan atau mendesak kebijakan yang menjamin pemenuhan hak dan akses ekonomi perempuan. Namun disisi lain, ruang politik ini juga memberikan apropriasi kepentingan secara personal kepada masing-masing anggota IWAPI tersebut, terkait peran mereka sebagai aktor politik. Jalur

politik dapat membuka atau memperkuat *resource alliance* aktor dengan berbagai kelompok strategis lainnya, baik dengan sesama pengusaha ataupun kelompok birokrat yang pada akhirnya membuka jalan bagi apropriasi mode korporat. Namun apropriasi mode korporat pada satu sisi juga ditempuh oleh anggota IWAPI yang memiliki *rank position* dan skala industri yang besar. Sebagai pemilik bisnis besar, kelompok strategis ini dapat mengandalkan akses sumber daya tertentu melalui pembentukan aliansi dan *resource networks*. Pembentukan aliansi ini dapat dilihat bagaimana anggota IWAPI juga menjadi bagian atau anggota dari organisasi lain seperti HIPMI, meski tidak semua. Namun kesadaran kepentingan sebagai kelompok pengusaha memberikan ruang bagi terbentuknya aliansi kepentingan, hanya saja strategi yang dilakukan tidak sampai pada bentuk hibridisasi, namun hanya berbentuk kerjasama. Disisi lain, menjalin aliansi dengan kelompok pengusaha bertujuan juga untuk *corporate expansion* anggota IWAPI itu sendiri. Dalam konteks ini, IWAPI bukanlah kelompok strategis, melainkan organisasi yang dibentuk oleh kelompok strategis yakni perempuan untuk mencapai kepentingan mereka.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat dijabarkan dalam beberapa poin: Kesadaran perempuan anggota IWAPI mengenai partisipasi aktif dalam politik telah terbangun dengan baik. Kesadaran ini tidak saja dikondisikan atau ditransfer oleh IWAPI terhadap anggotanya, namun anggota IWAPI yang secara individu telah memiliki pandangan terhadap pentingnya peran atau partisipasi aktif perempuan dalam politik. Namun perlu ditegaskan, anggota-anggota IWAPI yang memiliki kesadaran ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni kelompok anggota yang memiliki kesadaran dan aktifitas politik aktif dalam politik. Anggota ini tidak saja tergabung dengan IWAPI namun juga merupakan anggota partai politik tertentu. Kedua, kelompok anggota yang mengakui berpolitik adalah upaya strategis untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan, namun kelompok ini tidak berpartisipasi secara aktif dan bahkan menolak untuk terlibat aktif dalam politik. Keengganan anggota IWAPI terlibat politik disebabkan, terutama oleh batasan kultural yakni peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Rasa bersalah, atau tidak mendapat izin dari suami menjadi alasan yang membatasi kiprah aktif perempuan dalam politik.

Dari aspek strategi membangun jejaring, sebagai organisasi IWAPI fokus pada membangun jaringan dengan organisasi sosial yang bergerak pada bidang yang sama. Namun IWAPI tidak menasar secara khusus kelompok politisi, dengan alasan tidak memiliki tujuan politik. Kedekatan atau relasi dengan beberapa kelompok politisi dianggap sebagai wadah penguatan kerjasama dalam aspek pemberdayaan ekonomi perempuan. Sedangkan dari konteks individu anggota IWAPI, privilege menjadi anggota IWAPI untuk membangun jaringan ke kelompok politik masih belum banyak dilakukan. Selain itu, anggota IWAPI yang berpolitik pada dasarnya memiliki kesempatan untuk memanfaatkan IWAPI sebagai basis perolehan suara dengan melakukan mobilisasi para anggotanya, namun kebijakan IWAPI yang secara tegas berorientasi pada lembaga non-profit mencegah hal ini. Secara formal, IWAPI sendiri tidak berafiliasi atau terhubung secara formal dengan politisi ataupun partai politik tertentu; justru didalam IWAPI, anggotanya berafiliasi dengan berbagai partai. Oleh karenanya mobilisasi

suara dalam IWAPI secara etis tidaklah diperkenankan, untuk menjaga rasa keadilan dan solidaritas perempuan.

Secara sederhana, IWAPI dapat dikategorikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh kelompok strategis untuk menjamin akses terhadap sumber daya tertentu, yang dapat dikatakan sebagai kelompok strategis disini adalah perempuan. Sebagai kelompok strategis, perempuan melalui IWAPI berupaya membangun aliansi dan jejaring sumber daya. Ada dua mode apropriasi yang dijalankan, yakni mode apropriasi personal dan korporat. Dalam konteks apropriasi personal, anggota IWAPI memilih jalur politik untuk mengamankan akses sumber daya. IWAPI sebagai suatu organisasi dapat memberikan legitimasi institusional kepada anggota IWAPI, serta memberikan akses informasi kepada anggota IWAPI serta kesempatan membangun jejaring bisnis dan politik. Disisi lain, akses politik dapat memberi ruang bagi terbentuknya aliansi dengan kelompok strategis dan kelompok politik lainnya. Sedangkan mode apropriasi korporat dilakukan melalui cara perluasan bisnis dan menjangkau *network resources*, baik itu melalui aliansi sesama pengusaha perempuan atau dengan pengusaha lainnya dengan melakukan ekspansi perusahaan untuk mengontrol akses alat-alat produksi; ataupun dengan mengandalkan *network resources* berbasis *kinship* atau kedekatan identitas dan keluarga.

Strategi yang dijalankan *vis a vis* dengan kelompok strategis lainnya, misalnya HIPMI dan berupa kerjasama (*cooperation*). Ini terlihat dari relasi institusional yang sifatnya informal IWAPI dan HIPMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, Earl. 1980. *The Practice of Social Research*. California: Belfast.
- Birch, A.H. 1971. *Key Concept in Political Science: Representation*. London: Pall Mall Press Ltd.
- Bryson, Valerie. 2003. *Feminist Political Theory: an Introduction (2nd edition)*. New York: Palgrave Macmillan
- Evers, Hans-Dieter & Tilman Schiel. 1990. *Kelompok-kelompok Strategis: Studi Pembangunan tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press
- Fakih, Mansour. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fashri, Fauzi. 2014. *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra
- Goertz, Gary & Amy G. Mazur. 2008. *Politics, Gender and Concepts: Theory and Methodology*. Cambridge: Cambridge University Press
- Heywood, Andrew. 2013. *Politik (terj)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius Press
- Krippendorff, Klaus. 1991. *Analisis Isi Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Krook, Mona Lena & Fiona Mackay. 2011. *Gender, Politics and Institution: towards a feminist institutionalism*. New York: Palgrave Macmillan

Lovenduski, Joni. 2005. *State Feminism and Political Representation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Moeleong, Lexy. 1995. *Penelitian Kualitatif, Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Rosdakarya

Nazir, Moh. 1981. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Parpart, Jane L, et.al. 2000. *Theoretical Perspective on Gender and Development*. Canada: International Development Research Centre. Pendit, Putu laxman (ed.). 2009.

Merajut Makna: Penelitian Kualitatif Bidang Perpustakaan dan Informasi. Jakarta: Penerbit Cita Karya Karsa Mandiri.

Ruwaida, Ida. " Pemberdayaan dan Aksi Kolektif Perempuan: Sebuah Refleksi Sosiologis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 18 No. 2 Tahun 2016.